

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umumnya struktur modal perusahaan terdiri atas, utang, saham preferen dan saham biasa, sehingga struktur modal mempunyai peran yang sangat penting untuk kelangsungan perusahaan. Dimana salah satu dana struktur yang banyak digunakan dalam membiayai operasional perusahaan adalah utang, baik utang bank, maupun utang lainnya. Penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, salah satu aspek yang menyebabkan penggunaan utang lebih banyak yaitu pajak.

Pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan kebijakan dan peraturan perpajakan. Dimana peraturan dan kebijakan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merencanakan pajak terutang bila dihubungkan dengan struktur modal, dimana dalam undang-undang pajak penghasilan terdapat perbedaan pengakuan antara biaya salah satunya biaya bunga. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a menyatakan bahwa biaya bunga dapat dikurangkan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Dengan adanya undang-undang tersebut perusahaan yang dikenakan tarif pajak tinggi, dapat memanfaatkan undang-undangkan tersebut, dimana semakin besar laba yang diperoleh maka pajak yang harus dibayar

perusahaan semakin besar pula, maka perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak tersebut dengan peningkatan hutang sebab bunga pinjaman dapat dibiayakan untuk memperoleh penghasilan kena pajak namun disisi lain peningkatan utang akan berakibat buruk bagi perusahaan jika utang tersebut tidak bisa dikelola dengan baik (Suprianto, 2008: 4).

Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan memanfaatkan penggunaan utang dalam struktur modalnya. Namun penggunaan utang dalam struktur modal harus diperhatikan dengan baik karena penggunaan utang yang tinggi juga akan mengakibatkan kebangkrutan.

Beberapa fakta tentang peningkatan utang perusahaan dimana telah mengakibatkan beberapa perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tidak mampu membayar utang tersebut, sebagaimana telah diberitakan dalam media online edisi senin 26 November 2012 yang dikutip dalam www.republika.co.id sebagai berikut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 14 emiten dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) karena tidak memenuhi aturan. Empat diantara emiten tersebut dikeluarkan dari DES karena memiliki utang yang melampaui aturan Bapepam-LK. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Bakrie Telecom Tbk, PT Verau Coal Energy Tbk, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, dan PT Indosat Tbk. Menurut Bapepam-LK utang yang dimiliki keempat perusahaan tersebut sudah melebihi batas yang ditentukan regulator. Sepuluh perusahaan lain yang keluar dari DES adalah PT Bhakti Investama Tbk, PT Bumi Resources Minerals Tbk, PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, PT Cahaya Kalbar Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Modern Internasional Tbk, PT Petrosea Tbk, PT Polaris Investama Tbk, PT Sumber Energi Andalan Tbk, dan PT Trada Maritime Tbk. Kesepuluh ini tidak masuk lagi ke daftar efek syariah karena

pendapatan riba perusahaan melebihi aturan Bapepam-LK, yaitu 10 persen.

Tingginya tingkat utang pada perusahaan di Indonesia yang telah diuraikan diatas merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Dimana peningkatan utang bila dilihat dari segi pajak akan mengurangi beban pajak yang akan dibayar sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1963) dalam Hanafi (2008: 306) yang menyatakan bahwa semakin besar utang yang digunakan, maka pajak yang akan dibayar semakin kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani Endah Nilam yang menunjukkan hasil bahwa *longterm debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sedangkan *longterm debt to asset ratio* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan terutang dan *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan terutang.

Perusahaan telekomunikasi merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri informasi dan merupakan wajib pajak badan yang harus melaporkan pajak yang harus dibayar setiap tahun. Dimana dari data yang diperoleh melalui Indonesia *Stock Exchange* (www.idx.co.id) terjadi fluktuatif terhadap tingkat utang dan beban pajak pada perusahaan telekomunikasi, yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Perbandingan Tingkat Utang Dan Beban Pajak Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar di BEI periode 2007-2012

No	Nama perusahaan	Tahun	Tingkat utang	Beban pajak
1	PT. Bakrie Telecom Tbk	2007	59,80%	75,42%
		2008	40,53%	41,24%
		2009	55,95%	47,27%
		2010	57,95%	82,56%
		2011	64,23%	205,20%
		2012	81,91%	394,61%
2	PT. Excelkomindo Pratam Tbk	2007	76,25%	267,25%
		2008	85,10%	60,10%
		2009	67,85%	640,80%
		2010	57,01%	976,72%
		2011	56,07%	1034,54%
		2012	56,65%	986,77%
3	PT. Indosat Tbk	2007	62,83%	859,52%%
		2008	65,76%	419,83%
		2009	66,77%	677,27%
		2010	65,47%	357,80%
		2011	63,93%	249,40%
		2012	64,88%	25,80%
4	PT. Smartfren Telecom Tbk	2007	60,41%	6,50%
		2008	84,84%	109,62%
		2009	83,34%	49,72%
		2010	102,66%	38,05%
		2011	73,42%	249,25%
		2012	65,24%	248,52
5	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2007	47,53%	7927,82%
		2008	51,79%	5639,70%

2009	49,31%	6373,70%
2010	43,45%	5546,08%
2011	40,83%	5387,00%
2012	39,86%	5866,00%

Sumber: Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat fluktuasi tingkat utang dari tahun 2007 sampai 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana beban pajak juga mengalami peningkatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan disebabkan karena pajak tangguhan yang harus dibayar oleh perusahaan akibat transaksi yang terjadi di masa lalu sehingga mengakibatkan bertambahnya kewajiban perusahaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu serta didukung oleh data yang diperoleh, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Beban Pajak Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia menunjukkan tingkat utang yang berfluktuasi selama 4 tahun pada perusahaan telekomunikasi periode 2007-2012 sebabkan karena adanya peningkatan ekspansi perseroan dan biaya untuk melakukan pengembangan atau peningkatan jaringan interkoneksi serta adanya peningkatan kewajiban pajak.
- 2) Beban pajak pada perusahaan telekomunikasi menunjukkan hasil yang fluktuatif selama periode 2007-2012 karena adanya peningkatan hutang bank.

1.3 Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini apakah tingkat utang berpengaruh terhadap beban pajak pada perusahaan industri telekomunikasi terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2007-2012?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat utang terhadap beban pajak pada perusahaan industri telekomunikasi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2007-2012.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni

- 1) Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam membandingkan penelitian-penelitian terdahulu tentang tingkat utang terhadap beban pajak pada perusahaan industri telekomunikasi.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yakni

- 1) Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan terhadap penggunaan utang perusahaan.
- 2) Bagi kreditor, diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan kreditor untuk memberikan kredit bagi perusahaan.